

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Dari uraian diatas yang berjudul analisa kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi APBD dikaitkan dengan RPJMD), dan sesuai dengan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Secara umum kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara umum sudah mengarah kepada hal-hal yang positif.
- b. Di dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu komponen dalam kebijakan publik yang diterapkan mulai dari mekanisme penyusunan atau perencanaan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai sampai dengan penyusunan ebudgeting
- c. Tetapi meskipun demikian bukan berarti bahwa hal yang sudah baik tersebut apabila dikaitkan dengan kajian Analisa kebijakan, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang harus ditingkatkan terutama didalam konsep musyawarah rencana pembangunan yang waktu pelaksanaannya kurang lama, sehingga hasil yang dihasilkan di dalam musrenbangpun terkesan kurang optimal.
- d. Karena masih terdapat titik kritis yang harus dilewati yaitu koordinasi dengan legislative, karena hal ini merupakan titik sentral apakah ajuan rancangan anggaran yang diajukan dapat diterima. Pengalaman pada beberapa daerah, Kepala Daerah terjatuh kasus juga pada titik ini.
- e. Operasionalisasi dari visi dan misi Pemerintah perlu untuk dijabarkan dan disosialisasikan sampai kepada jajaran yang terbawah, sehingga menimbulkan kesatuan Bahasa dan langkah semua pemangku kepentingan.
- f. Sehingga akan terjadi suatu dampak apabila suatu perencanaan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengikuti alur atau akidah kebijakan public, maka dimungkinkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan tidak terwujudnya good governance dan clean government.
- g. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada khususnya yang berkaitan dengan penyusunan anggaran masih perlu untuk mendapatkan perhatian.
- h. Di lain pihak juga terdapat kendala dimana mutasi atau purna seorang pegawai merupakan sesuatu yang wajar, akan tetapi meskipun demikian di

dalam pemilihan penempatan seorang pegawai juga harus didasarkan benar-benar kompetensi dan integritas seseorang.

- i. Salah satu permasalahan di dalam siklus penyusunan kebijakan publik yang sangat krusial adalah pengungkitan penyebab masalah, yang kadangkala masih terintervensi dengan kepentingan politik, yang cenderung untuk terjadinya politik transaksional di dalam penyusunan anggaran khususnya antara Tim Penyusunan Anggaran Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Disamping itu masalah lain yang juga ditemukan adalah tidak adanya tools dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan, sehingga dalam penyusunan anggaran akan dapat diketahui titik-titik kelemahan yang perlu untuk dibenahi dan titik-titik yang harus dipertahankan.

7.2. Saran

- a. disadari bahwa di dalam suatu penelitian kualitatif masih perlu untuk terus diperbaiki dan disempurnakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan dapat lebih menyempurnakan penelitian sebelumnya.
- b. Disamping itu disarankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk selalu menyempurnakan sistem manajemen penganggaran sekaligus yang dapat digunakan sebagai monitoring dan evaluasi.